

KERABAT



IMPLEMENTASI

8 Area REFORMASI BIROKRASI

**Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan**



**SUBBAG INMAS
KANWIL KEMENAG KALSEL**

Edisi **83**
Catur Wulan I Tahun XI 2018



Pentingnya Sinergitas dan Komitmen untuk implementasikan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama

Oleh : H. Ahmad Kamal



Reformasi Birokrasi masih terus bergaung di lingkungan Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam KMA No. 447 Tahun 2015, perihal Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019, maka dalam rangka evaluasi program Reformasi Birokrasi sangat dibutuhkan sinergitas antara seluruh stakeholder Kementerian Agama, hal tersebut tentunya menjadi faktor utama yang sangat mendukung untuk mewujudkan implimentasinya, terlebih dengan telah ditetapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

“Ditetapkannya 8 area perubahan ini, menjadi bukti penting bahwa Kementerian Agama saat ini benar-benar serius melakukan Reformasi Birokrasi yang salah satu wujudnya adalah dengan secara tegas menyatakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” Tegas Sekjen Kemenag RI, Nursyam. 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama ini adalah Manajemen Perubahan, Penataan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Layanan Publik.

Organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mental aparatur.

Tentunya untuk suksesnya penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi ini perlu komitmen bersama seluruh ASN Kemenag. Mengingat Kementerian Agama sekarang dalam proses penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk memperoleh predikat WTP dan tentunya berimbas pada naiknya Tunjangan Kinerja ASN Kementerian Agama itu sendiri. Oleh karena itu, kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama yang berada di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh satker yang berada di daerah agar bisa menyikapi hal ini dengan sebaik-baiknya dan bisa diterapkan ditempat kerja masing-masing.

Kerabat edisi 83 kali ini, redaksi memuat tema besar “implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi di Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel” dengan mengupas area yang menjadi tujuan perubahan melalui beberapa tulisan beberapa penulis dari kalangan Pejabat Kanwil Kemenag Prov. Kalsel. Semoga bermanfaat untuk para pembaca terutama ASN di lingkungan Kemenag Provinsi Kalsel.

REDAKSI Kerabat

PEMBINA : Drs. H. Noor Fahmi, MM
 PENANGGUNG JAWAB : Drs. H. Muslim, M.Pd.I
 REDAKTUR : H. Ahmad Kamal, S.HI, M.Ag
 PENYUNTING/EDITOR : Badariyah, S.Ag.
 DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER : Rajudin, S.AP
 SEKRETARIAT (Pengumpul Bahan/Artikel):
 Jain Rahman, S.Kom, Marianti, SEI.
 SEKRETARIAT
 (Dokumen) :Rahma Widiyawati, SE
 (Editing) Rhoma Wiaya, SH.I, Eka Susana, SE.
 (Distribusi) Iwan Setiawan, S.Kom,
 Akhmad Ramadhan, S.Kom,

Ijin Terbit:

SK. Menpan RI No 1958/DITJEN BPG/SPP/1993. Tanggal 27 Desember 1993

Penerbit : Sub. Bagian Informasi dan Humas

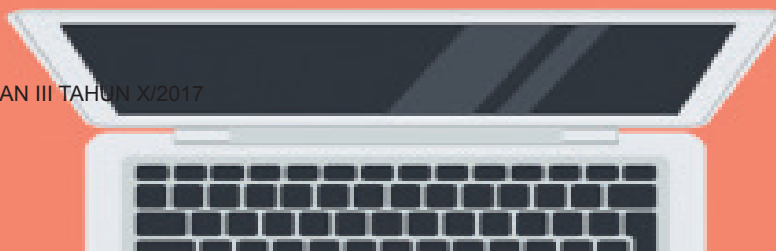
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Jl. D.I. Panjaitan No. 19 Banjarmasin. Telp. (0511) 3353472 / 085245677171

Email : kanwilkalsel@kemenag.go.id

Dicetak Oleh :

CV. IZZ BORNEO GRAFIKA



Implementasi 8 Area Perubahan Di Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel

Terdapat 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama yang menjadi fokus pembahasan redaksi kali ini, yakni : Manajemen Perubahan, Penataan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Layanan Publik.

Tujuan dari ditetapkan-nya 8 area perubahan ini ialah menciptakan birokrasi Kementerian Agama selaku instansi pemerintah yang memberikan pelayanan di bidang keagamaan lebih profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik,

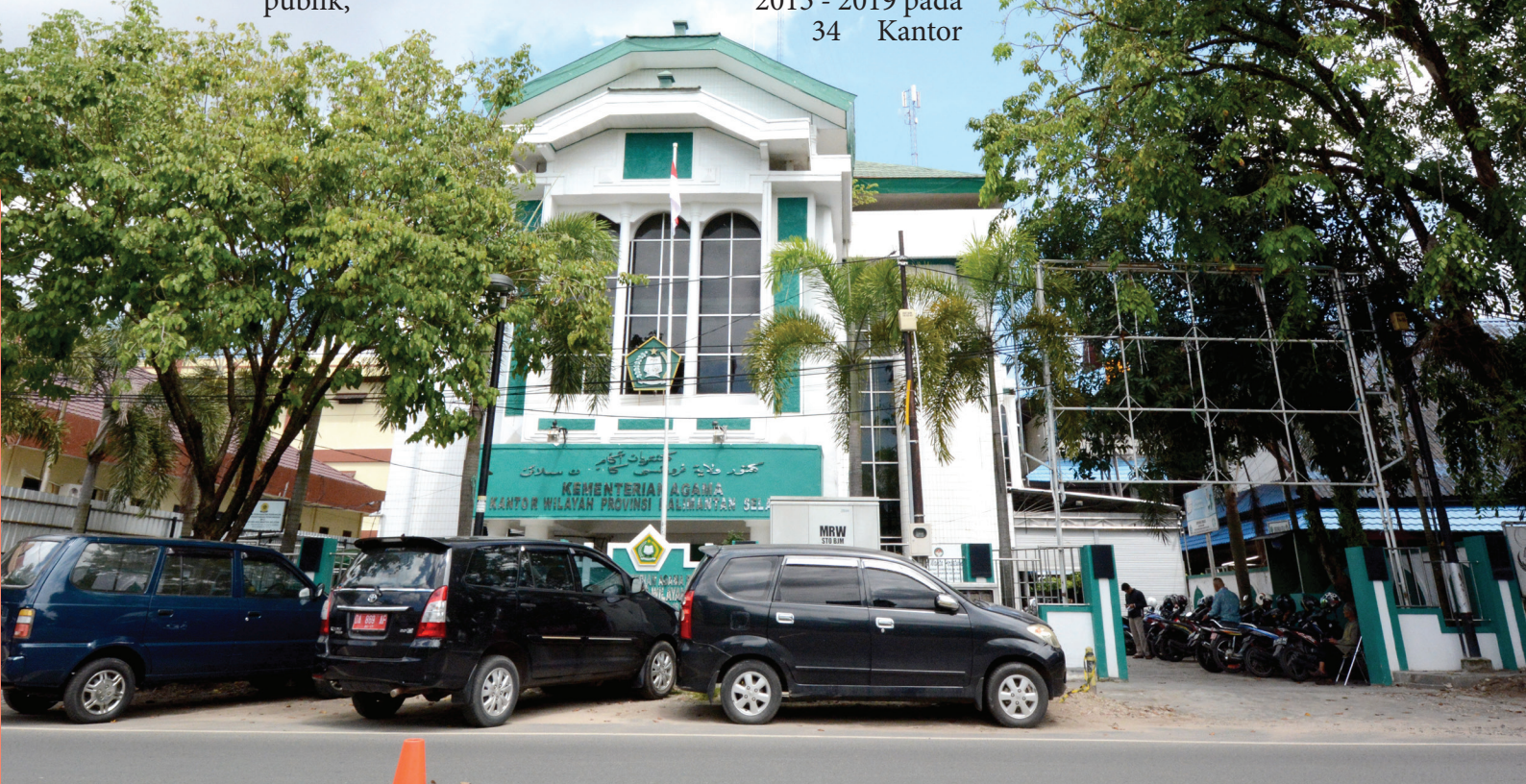
netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Maka yang menjadi sasaran dalam penerapan 8 area perubahan tersebut, ialah: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Dari 8 item area perubahan yang ada, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan implementasi beberapa hal yang terkait dengan Reformasi Birokrasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil Asistensi dan Pemenuhan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017 terkait implementasi KMA Nomor 582 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019 pada

34 Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi, di mana Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan menempati posisi urutan ke 14 dengan raih-an hasil nilai kumulatif 64,75 dengan rincian sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan : 12
2. Penataan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan : 2
3. Penataan dan Penguatan Organisasi : 0
4. Penguatan Tata Laksana : 9,25



5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur : 15,75
6. Penguatan Akuntabilitas : 4,5
7. Penguatan Pengawasan : 11,25
8. Penguatan Kualitas Layanan Publik : 10

Capaian tersebut di atas dihasilkan menurut penghitungan aplikasi monitoring pokja RB Kemenag melalui website www.e-pokjarb.kemenag.go.id pada Tahun 2017.

Mengingat kenaikan indeks RB telah ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas hasil RAKERNAS Kementerian Agama Tahun 2018, maka sangat diperlukan perhatian penuh untuk dapat meningkatkan indeks prestasi nilai RB tersebut di lingkungan Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan pada area yang nilainya masih rendah dan terutama masih nihil.

Tentunya hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan optimal, kalau tidak didukung secara sinergitas seluruh stakeholder/unit kerja dan komitmen yang tinggi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Sinergitas seluruh stakeholder dan unit kerja sangat diharapkan baik dalam upaya penguatan program dan anggaran maupun peningkatan pelayanan publik. Sinergitas dimaksudkan bahwa program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Agama yang ada pada unit, seksi, satker mampu mengarah pada satu tujuan yang terfokus terhadap prioritas bersama.

Dalam hal komitmen untuk meraih peningkatan indeks di atas, mengingatkan penting-

nya membangun komitmen dalam tiga hal. Pertama, bangun komitmen untuk kebersamaan. Dalam arti bersama bekerja dan bekerja bersama. Kedua, bangun komitmen untuk mencapai keberhasilan. Keberhasilan hanya akan dapat dibangun melalui kebersamaan, dan keberhasilan dapat ditunjukkan dengan pelayanan yang optimal karena pelayanan yang optimal akan menghasilkan kepuasan pelanggan. Ketiga, bangun komitmen untuk menjadi yang terbaik. Indikator manusia yang terbaik itu adalah ketika lebih bermanfaat bagi manusia lain. Semua agama mengajarkan untuk memberikan yang terbaik. “Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain.”

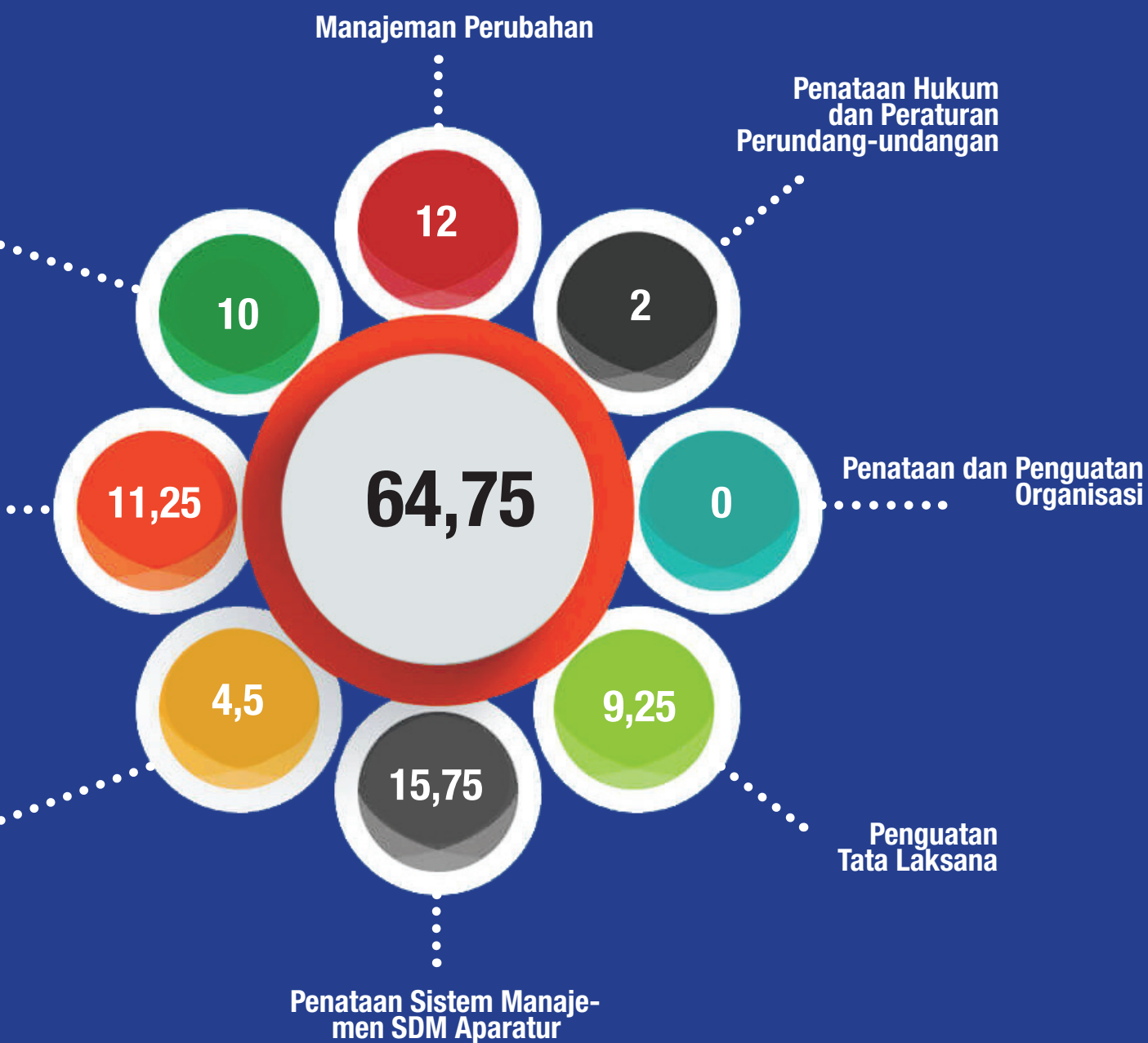
Sekjen Kemenag, Nur Syam mengingatkan terdapat beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian lebih dari penerapan/implementasi RB ini: minimnya sosialisasi dalam menerapkan Road Map RB, begitu juga dengan regulasi yang hingga kini masih ditemukan tumpang tindih sehingga membutuhkan kebijakan tentang regulasi. Maka, diperlukan peran aktif Tim kelompok Kerja (Pokja) dan agen perubahan untuk melakukan inovasi terhadap implementasi pada 8 area perubahan reformasi birokrasi Kementerian Agama.

Spirit Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang selama ini terus diupayakan perkembangan dan peningkatannya di antaranya dalam bentuk kegiatan-kegiatan dengan transaksi Non Tunai, pelayanan inovatif dengan berbagai program aplikasi digital/online, dan juga yang menjadi perhatian bersama adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

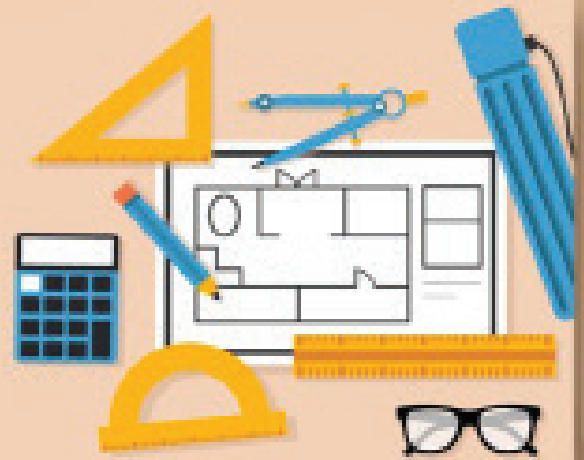
**Penguatan
Kualitas Layanan
Publik**

**Penguatan
Pengawasan**

**Penguatan
Akuntabilitas**



daftar isi



Cover.....	01
Editorial dan Redaksi	02
Topik	03 - 04
Daftar Isi	06 - 07
Topik Utama	08 - 28
 FOTO KERABAT	 30 - 31
BERITA NASIONAL	32 - 35
BERITA PROVINSI	36 - 39
BERITA DAERAH	40 - 51
 COVER BELAKANG	 52



Ka. Kanwil Kemenag
Prov Kalsel H. Noor
Fahmi bersama Menteri
Agama Lukman Hakim
Saifuddin, saat membuka
secara resmi kegiatan
Rakerwil Kementerian
Agama Provinsi
Kalimantan Selatan.
di Hotel G-Sign
Banjarmasin, (26/03)



Reformasi Birokrasi "Saatnya Pemimpin Lakukan Perubahan" 08

.....
Drs. H. NOOR FAHMI, MM
Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan



Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi 13

.....
Drs. H. MUSLIM, MM
Kepala TU Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan



Penataan Tatalaksana Di Kementerian/Lembaga 16

.....
Dra. H. FAJRIANNOR SUBHI, MM
Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Kalsel



Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 19

.....
H. AHMAD SAWITI, S.Ag, M.HI
Kabis Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag Kalsel



Penguatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Peraturan Perundang-undangan 21

.....
MUKHLIS RIDHANI, S.Ag, MH
Kasubbag Hukum dan KUB Kanwil Kemenag Kalsel



8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi 24

.....
Drs. H. NAJWAN NOOR, M.Pd
Kasubbag Ortapeg Kanwil Kemenag Kalsel



**Ayo Mondok
(Sebuah Pengalaman Singkat Menjadi Santri di Pondok Pesantren) 26**

.....
Drs. H. SAID MUHDARI, MM
Kasubbag Umum Kanwil Kemenag Kalse

REFORMASI BIROKRASI

"Saatnya Pemimpin Lakukan Perubahan"

Oleh : H. Noor Fahmi



Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan

profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Reformasi adalah perubahan, perombakan, penataan, perbaikan atau penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga/instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. Layanan kepada masyarakat harus berkualitas, bebas KKN, efektif dan efisien, empati, terjangkau, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan mindset, KKN yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel,

pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima belum terbangun secara luas. Dalam grand design reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu bidang utama dalam pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJM 2004-2009 dan 2010-2014, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010-2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015-2019). Dengan kata lain, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015-2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya serta pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa mendatang. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2015-2019 diarahkan pada tiga sasaran yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019. Ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut adalah Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien, dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Reformasi birokrasi itu ibarat menggelindingkan

sebuah roda besar agar jalannya menjadi cepat. Kementerian Agama memiliki satuan kerja dengan jumlah pegawai yang sangat banyak, dan tentu saja Reformasi Birokrasi memerlukan energi dan strategi khusus untuk menuntaskannya. Reformasi Birokrasi sudah berjalan di Kementerian Agama sejak tahun 2009. Seiring dengan berjalannya waktu hingga kini perubahan-perubahan semakin dirasakan dengan tercapainya beberapa layanan baik pada internal maupun eksternal yang dirasakan oleh masyarakat.

1. Organisasi : Organisasi pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem organisasi

Terkait reformasi birokrasi, Kementerian Agama telah memiliki Kelompok Kerja masing-masing yang bertugas membahas dan melaksanakan reformasi birokrasi di dalam lingkungan Kementerian Agama. Adapun reformasi birokrasi tersebut mencakup 8 (delapan) area perubahan yaitu :

1 ORGANISASI

2 TATA LAKSANA

3 SDM APARATUR

4 PERUNDANG UNDANGAN

5 PENGA-
WASAN

6 AKUNTABILI-
TAS

7 PELAYANAN
PUBLIK

8 MENTAL
APARATUR

KERABAT UTAMA

- akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem organisasi diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.
2. **Tata Laksana :** Kejelasan proses bisnis/tata kerja/tata laksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tata laksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.
 3. **SDM Aparatur :** Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.
 4. **Perundang-undangan :** Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan **p e n y i m p a n g a n** . Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
 5. **Pengawasan :** Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.
 6. **Akuntabilitas :** Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.
 7. **Pelayanan Publik :** Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.
 8. **Mental Aparatur :** Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit,

tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Seluruh unsur ASN Kementerian Agama agar lebih serius dalam upaya mendorong perbaikan birokrasi, senantiasa bersinergi dalam melaksanakan program serta kegiatan yang berdampak langsung pada Kementerian Agama dan masyarakat. Para pimpinan yang merupakan penggerak dan pembaharu birokrasi, sejarah membuktikan bahwa figur pemimpin memegang peran kunci dalam sebuah perubahan. Secara sederhana, praktek implementasi Reformasi Birokrasi, sesungguhnya akan menjadi lebih akseleratif, jika pemimpin mampu menjalankan peran sebagai teladan atau figur yang mampu menginspirasi terjadinya sebuah perubahan. Selanjutnya kita perlu menerjemahkannya dalam gagasan dan tindakan sehari-hari yang akan dijadikan teladan. Tidak cukup hanya itu, inovasi pun dituntut sebagai salah satu syarat dalam meningkatkan reformasi birokrasi.

Seorang pemimpin harus mampu menginspirasi para pengikutnya. Inspirasi paling nyata, bukanlah dengan retorika, tapi justru dengan kerja nyata, satu kata dengan perbuatan. Untuk menghasilkan suatu perubahan

nyata, sudah tentu, pemimpin tidak bisa bekerja sendiri. Tanpa itu, rasanya mustahil. Suatu perubahan menghendaki tangan-tangan yang bersinergi untuk membangun kekuatan yang bisa melahirkan perubahan. Seberapapun kuat figur seorang pemimpin, dia tetap harus menyadari bahwa dirinya memiliki keterbatasan dan karenanya memerlukan dukungan dari orang atau pihak lain. Dengan bersinergi sebuah tantangan yang berat akan menjadi ringan sehingga target-target reformasi birokrasi dapat dicapai. Jika mampu membangun sinergi itu, pemimpin akan menjadi lebih mudah dalam melakukan sebuah perubahan.

Terdapat tujuh kekuatan yang harus dimiliki oleh para pimpinan dan semua kita sebagai penggerak dan pembaharu reformasi birokrasi, yaitu:

1. Memiliki potret keadaan birokrasi setelah reformasi itu dilakukan.
2. Harus siap untuk bertarung atau bertentangan dengan kultur yang selama ini ada dalam birokrasi.
3. Menjalankan agenda reformasi birokrasi haruslah memiliki kemampuan untuk menerjemahkan kerumitan konsep itu ke dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
4. Peka (sensitive) dan mampu memberi penghargaan terhadap setiap pencapaian yang dihasilkan. Sekecil

apapun bentuk capaian itu, dia tidak bisa dan tidak boleh meremehkan, apalagi mempermalukan orang yang terlibat bersamanya dalam proses implementasi reformasi birokrasi itu. Keharusan pemimpin memberikan apresiasi terhadap sebuah capaian perubahan, meski kecil, tetaplah sebuah kontribusi. Apresiasi itu bisa menjadi dasar bagi terjadinya perubahan yang lebih besar.

5. Memberikan perhatian pada setiap orang yang terlibat dan mendukung upaya reformasi birokrasi. Artinya, seorang pemimpin harus mampu memposisikan dukungan sebagai aset bagi pencapaian sebuah perubahan.
6. Penggerak proses reformasi birokrasi adalah orang yang tak boleh berhenti belajar. Dia tidak selalu harus muncul menjadi orang yang paling mengerti atau pintar dalam segala hal. Sehingga dalam sebuah proses, pemimpin mutlak harus terus belajar dan terbuka terhadap gagasan-gagasan baru, sekalipun gagasan itu datang dari mereka yang dari sisi hirarki berada di bawahnya.
7. Harus mampu membangkitkan rasa kepemilikan (ownership) pada setiap orang yang diajak dan terlibat dalam proses reformasi birokrasi.

Oleh karena itu, hanya dengan memobilisasi kekuatan

KERABAT UTAMA

sinergi yang dibangun, pemimpin akan dapat melahirkan sebuah perubahan. Sebelum sampai pada tahapan sinergi itu, jelas pemimpin dituntut untuk berbuat. Dia

harus mengawali langkah dengan perbuatan yang nyata untuk mengubah keadaan yang sebelumnya kurang baik, menjadi lebih baik. Seorang pemimpin tidak bisa dan tidak

boleh berpangku tangan. Dia harus berbuat dan mengubah keadaan. Dia harus bergerak untuk menghasilkan kondisi yang lebih baik.





Oleh : H. Muslim

Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Gerakan reformasi politik yang terjadi pada pertengahan 1998, salah satunya dilatarbelakangi oleh sistem birokrasi sebelumnya yang dinilai sarat dengan unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kurangnya efisiensi dan efektivitas administrasi birokrasi karena segala sesuatu terlalu prosedural, serta lemahnya demokrasi, sehingga hak-hak rakyat banyak terabaikan. Aparat birokrasi, pegawai negeri sipil (PNS), yang sekarang disebut dengan aparatur sipil negara (ASN)

cenderung minta dilayani, bukan melayani. Gerakan reformasi yang dimotori oleh sejumlah tokoh dan mahasiswa, bertujuan untuk membalik semua itu, supaya birokrasi ke depan lebih bersih dari KKN, demokratis dan lebih melayani masyarakat tanpa pandang bulu, sehingga tercapai percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Tetapi setelah hampir 20 tahun era reformasi bergulir, ternyata upaya melakukan reformasi birokrasi tidaklah mudah. Pemerintah telah

menempuh berbagai upaya untuk mewujudkannya, namun hasilnya belum optimal. Hal ini karena reformasi birokrasi sangat berkaitan dengan sikap mental PNS atau ASN itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih serius untuk mewujudkannya, baik melalui instrument peraturan perundang-undangan maupun pendekatan lainnya. Bagi jajaran Kementerian Agama, yang memiliki semboyan “Ikhlâs Beramal dan Mengabdikan”, upaya tersebut dapat pula dilakukan dengan mengoptimalkan energi ajaran

KERABAT UTAMA

agama yang dimiliki.

1. Mental Aparatur
Sege nap aparatur pemerintah di jajaran Kanwil Kementerian Agama Kalsel khususnya hendaknya mengubah sikap mental dan memperbaruinya ke arah yang lebih baik. Mentalitas negatif seperti lambat dan malas dalam merespon persoalan, berbelit-belit dalam melayani masyarakat dan berbagai sikap negatif lainnya, harus dihilangkan. Berganti dengan sikap mental cepat, responsif dan penuh semangat dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat. Tugas yang dibebankan oleh atasan dan instansi tempat kerja hendaknya jangan dianggap sebagai beban, melainkan medan pengabdian. Ajaran agama yang menyuruh mempermudah segala urusan dan menggembirakan orang yang berurusan, hendaknya dimanifestasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
2. Pengawasan
Pengawasan bukan semata instrumen untuk mencari-cari kesalahan, melainkan cara untuk memperbaiki kinerja agar pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat lebih baik. Setiap orang hendaknya bersedia dan terbuka untuk diawasi atasannya dan mau mengawasi anak buah yang menjadi tanggung jawabnya. Kita tidak boleh membiarkan kalau terjadi penyimpangan.
3. Akuntabilitas
Pelaksanaan tugas oleh ASN Kanwil Kementerian Agama tidak bisa semata untuk memenuhi kewajiban rutin, suruhan atasan, atau untuk kenaikan pangkat. Semua tugas haruslah benar-benar dihayati, dilaksanakan secara serius dan dapat dipertanggungjawabkan kuantitas dan kualitasnya. Pekerjaan tersebut bisa diurai dan dicek kebenarannya, transparan dan ada kepastian, sehingga menghasilkan kepuasan pada masyarakat yang dilayani. Hal ini sangat sejalan dengan tuntunan Alquran surah At-Taubah ayat 105 bahwa Allah, Rasul dan seluruh orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan yang kita lakukan, dan kita sebagai pegawai (pekerja) bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan mana akan dipertanggungjawabkan, baik kepada manusia (atasan) maupun ke hadirat Allah di akhirat nanti.
4. Kelembagaan
Apabila kita berposisi sebagai pimpinan, maka lembaga tempat kita bekerja perlu dirampingkan, supaya lebih efisien dan tidak gemuk, yang berakibat lambannya pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat. Dan ketika kita berposisi sebagai bawahan, maka perlu bekerja secara optimal, sehingga pimpinan tidak memandang perlu untuk menambah pegawai, karena tugas-tugas sudah dilaksanakan dengan baik. Bekerja secara efisien dengan hasil optimal hanya bisa diwujudkan jika didorong oleh perasaan ikhlas beramal dan tidak tergantung pada hitung-hitungan materi, insentif dan imbalan.
5. Tatalaksana
Reformasi birokrasi menuntut adanya ketepatan, kecepatan dan kepastian prosedur pelayanan masyarakat, baik waktunya, tahapannya, persyaratannya juga kualitasnya. Dengan begitu masyarakat dapat terlayani dengan baik. Hal ini menuntut profesionalitas kerja ASN serta semangat untuk terus melayani tanpa kenal lelah dan tanpa pandang bulu.
6. SDM Aparatur
Kinerja aparatur merupakan hasil dari motivasi kerja dan keterampilan kerja. Bagi ASN Kementerian Agama motivasi tersebut bisa berasal dari ajaran agama yang menuntut seseorang untuk beramal,

bekerja secara optimal atas dasar ibadah kepada Allah. Sedangkan keterampilan kerja dapat ditumbuhkembangkan dengan terus belajar, melalui otodidak serta pendidikan dan pelatihan. Untuk itu setiap ASN tidak boleh merasa cukup atau merasa puas dengan kemampuan yang ada dan prestasi yang telah dicapai. Ia harus berusaha untuk terus meningkatkannya, sebagai bagian dari prinsip belajar seumur hidup dan berlomba dalam kebaikan, musabaqah bil-khaira.

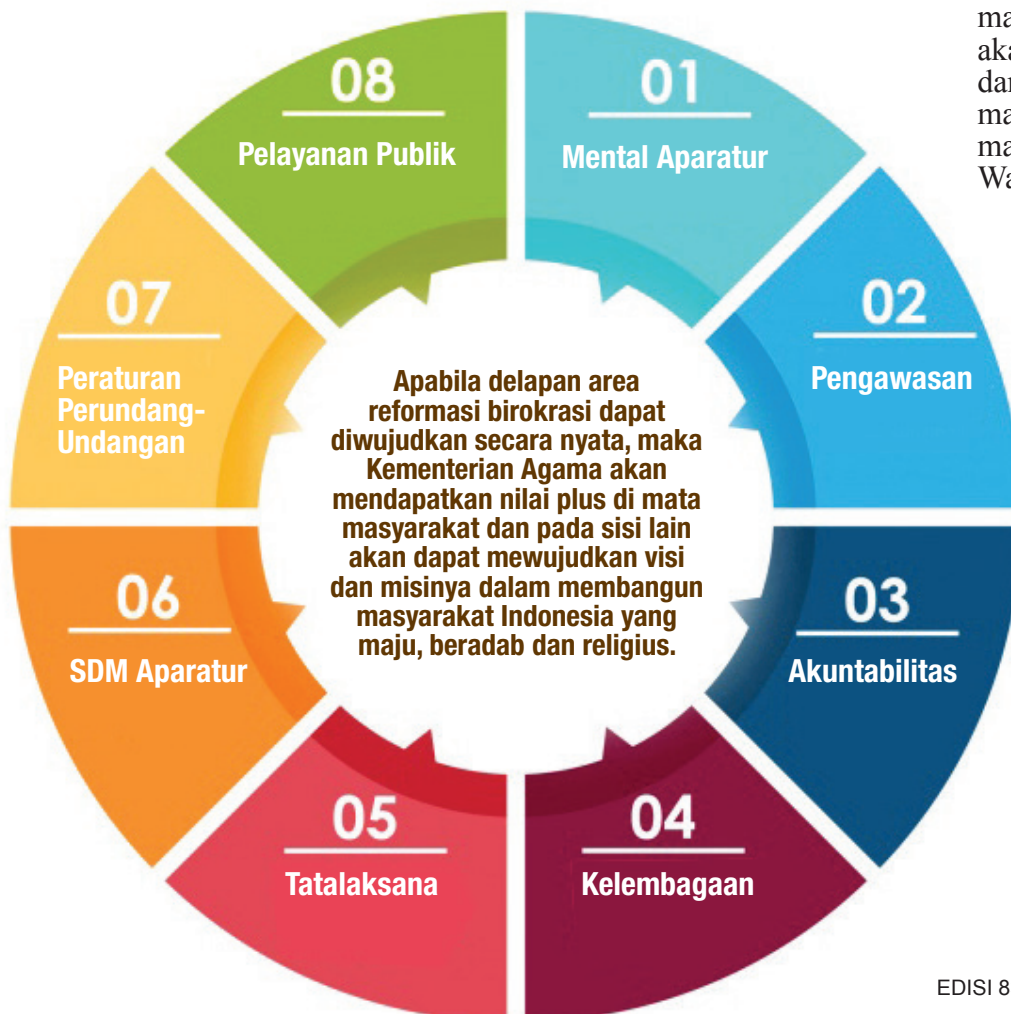
7. Peraturan Perundang-undangan
Setiap aparatur hendaknya

memahami setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya, serta mengikuti setiap adanya perubahan atau pembaruan terhadap peraturan tersebut sesuai dengan dinamika yang terjadi. Sekadar semangat kerja tanpa pengetahuan tentang peraturan juga tidak cukup, sebab bisa menjebak seseorang. Karena itu semangat kerja harus sejalan dengan pengetahuan terhadap peraturan, supaya aparatur memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan tugasnya, tanpa mengenyampingkan pentingnya kebijaksanaan dan diskresi ketika keadaan di lapangan menuntut berbuat lain sepanjang tidak melanggar peraturan

yang ada.

8. Pelayanan Publik
Pelayanan publik yang cepat, mudah, murah tetapi berkualitas harus menjadi ciri khas pelayanan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama. Hal ini harus menjadi komitmen bersama segenap aparatur, mulai dari pimpinan hingga pegawai biasa. Dengan adanya komitmen bersama maka kinerja lembaga dapat dilaksanakan secara koordinatif dan sinergis, dengan pencapaian hasil yang optimal.

Apabila delapan area reformasi birokrasi seperti yang diuraikan secara ringkas di atas dapat diwujudkan secara nyata, maka Kementerian Agama akan mendapatkan nilai plus di mata masyarakat dan pada sisi lain akan dapat mewujudkan visi dan misinya dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, beradab dan religius. Wallahu A'lam.



Penataan Tatalaksana Di Kementerian/Lembaga

Oleh : H. Fajriannor Subhi



Penataan tatalaksana di Kementerian/Lembaga menjadi salah satu faktor s u k s e s n y a pelaksanaan reformasi birokrasi yang diharapkan menghasilkan sistem prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Penataan atau perbaikan tatalaksana salah satunya akan bermuara pada pembuatan atau perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat.

“Melalui reformasi birokrasi di bidang tatalaksana diharapkan akan terwujud pelayanan berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu agar tercipta birokrasi yang profesional dan pelayanan yang optimal,”

Namun demikian kita jangan sombong dan cepat berpuas diri, kita harus terus meningkatkan pelayanan dan kinerja agar pelayanan ini dapat menyempurnakan ketatalaksanaan dan

peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Program Reformasi Birokrasi Nasional telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010. Pelaksanaan reformasi birokrasi nasional

sampai saat ini sudah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui PERMENPAN Nomor 11 Tahun 2015 Ada 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dalam Road Map tersebut dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019. Ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut, antara lain : 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, 2. Birokrasi yang efektif dan efisien, 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Guna terwujudnya ketiga sasaran reformasi birokrasi di atas, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif guna

mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi.

Ada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang dimaksud, yaitu : Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Publik. Terkait dengan usaha pemerintah dalam memperbaiki birokrasi, yang akhirnya disebut sebagai reformasi birokrasi, sehingga terdapat berbagai definisi tentang reformasi birokrasi, dengan pengertian yang berbeda-beda tentang reformasi birokrasi.

Menurut MenPan (www.menpan.go.id, diakses 19 Agustus 2014, reformasi birokrasi adalah upaya

untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima.

Menurut Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (www.ditjen.kemendukham.go.id, diakses 20 Agustus 2014 mengatakan, bahwa reformasi birokrasi adalah upaya perubahan, dimana perubahan yang dilakukan terkait reformasi birokrasi yaitu : Perubahan cara berfikir, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan organisasi, Penataan tatalaksana, Manajemen SDM aparatur, Penguatan pengawasan, Penguatan akuntabilitas kinerja dan



Sasaran reformasi birokrasi

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel,
2. Birokrasi yang efektif dan efisien,
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

KERABAT UTAMA

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:72) mengatakan, bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas. Dimana reformasi birokrasi itu mencakup beberapa perubahan yaitu:

- a. Perubahan cara berfikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak), maksudnya yaitu birokrasi harus merubah pola berfikir yang terdahulu (buruk), birokrasi harus memiliki pola pikir yang menyadari bahwa mereka sebagai pelayan masyarakat, harus mempunyai sikap dan pola perilaku yang baik, yang artinya tidak menyimpang dari peraturan yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Perubahan penguasa menjadi pelayan, maksudnya yaitu birokrasi harus merubah sikap mereka, karena yang dapat kita ketahui selama ini bahwa birokrasi selalu menganggap bahwa mereka

adalah penguasa dikarenakan memiliki jabatan yang tinggi dibanding dengan masyarakat sehingga mereka beranggapan bahwa mereka adalah penguasa yang harus selalu dihormati. Oleh sebab itu hal yang demikian harus dihilangkan dari birokrasi;

- c. Mendahulukan peranan dari wewenang, perubahan yang dimaksud adalah birokrasi harus selalu mengutamakan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Harus mampu melayani masyarakat dengan baik, dengan menyampingkan wewenangnya sebagai pejabat atau pegawai pemerintah;
- d. Tidak berfikir hasil produksi tapi hasil akhir, perubahan yang dimaksud adalah birokrasi harus selalu mengutamakan hasil akhir dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti menciptakan kepuasan bagi masyarakat;
- e. Perubahan manajemen kinerja, maksudnya yaitu merubah manajemen kinerja birokrasi agar menjadi lebih efektif dibandingkan

sebelumnya.

Organisasi dan tatalaksana merupakan alat untuk mencapai visi dan misi organisasi, pada tahun 2010 Pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025, salah satu agenda area perubahan yang dilakukan adalah di bidang organisasi dan Tatalaksana.

Tatalaksana (business process) adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penataan tatalaksana dilaksanakan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Target yang ingin dicapai melalui program ini antara lain yaitu meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan serta kinerja di Kementerian/Lembaga dan



PERUBAHAN Dalam Reformasi Birokrasi

1. PERUBAHAN CARA BERFIKIR
2. PERUBAHAN PENGUASA MENJADI PELAYAN
3. MENDAHULUKAN PERANAN DARI WEWENANG
4. TIDAK BERPIKIR HASIL PRODUKSI TETAPI HASIL AKHIR
5. PERUBAHAN MANAJEMEN KINERJA

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Oleh : H. Ahmad Sawiti



Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dan seperti yang kita ketahui bahwa salah satu esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah yang diarahkan kepada masyarakat. Berbagai upaya pun terus dilakukan oleh

publik pemerintah dan aparaturnya dalam peningkatan pelayanan publik itu.

Hal ini menjadi strategi atau upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia sepenuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik itu yaitu dengan meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah.

Kondisi birokrat yang memiliki kecakapan, ketrampilan, perilaku yang patuh pada hukum dan peraturan yang

berlaku, serta penempatan posisi yang sesuai dengan bidangnya, tentunya akan memberikan dampak yang positif kepada terciptanya pelayanan publik berkualitas. Sebab dewasa ini, keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat yang menilai pelayanan publik yang diberikan kepada mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap atau perilaku sumber daya manusia aparatur yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Satu hal lagi yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan pelayanan public

KERABAT UTAMA

melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai adalah masalah attitude atau perilaku.

Diperlukan sikap dan mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam pemberian layanan. Instansi perlu menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dengan tidak berbelit-belit, boros dan memakan waktu yang lama. Sehingga pada akhirnya nanti, masyarakat akan semakin lebih terpuaskan dengan setiap layanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain memperhatikan aspek-aspek diatas, salah satu sisi lain yang patut diperhatikan oleh instansi

pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik tersebut. Sebab, tanpa didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka akan menghambat proses penyelenggaraan pelayanan public kepada masyarakat.

Sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat pelayanan publik haruslah diselenggarakan seoptimal mungkin oleh pemerintah, bahkan sudah selayaknya pemerintah melakukan peningkatan

pelayanan publik itu sebagai salah satu tuntutan untuk menciptakan konsep good governance.

Peningkatan itu tentunya diharapkan juga mampu memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan semakin menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang menciptakan produk-produk pelayanan publik lain.



Penguatan Reformasi Birokrasi Melalui Emplementasi Peraturan Perundang - Undangan

Oleh : Mukhlis Ridhani



Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi aparatur pemerintahan, termasuk aparatur di lingkungan Kementerian Agama.

namun bagaimana agar masyarakat yang kita layani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik.

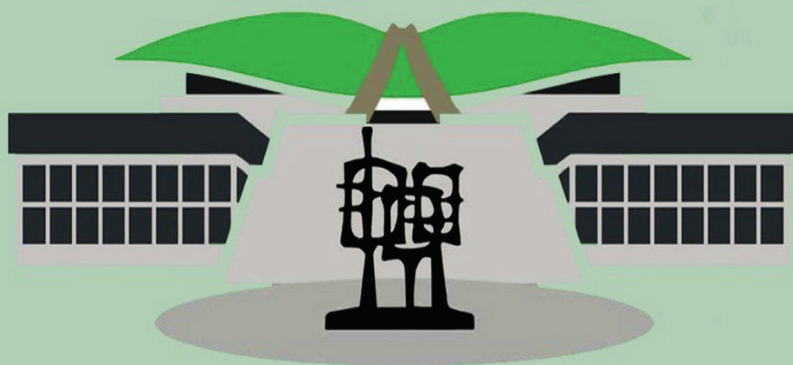
Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan sebuah perjalanan panjang dan bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, apalagi bila mengingat bahwa perubahan ini ditujukan pada adanya suatu perubahan pola pikir dan budaya individu. Namun, Kementerian Agama telah bertekad untuk terus melaksanakan apa yang telah dimulai pada tahun 2009. Kebulatan tekad ini semata-mata untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan sehingga diharapkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Agama terus meningkat.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja,

Dalam upaya penerapan reformasi birokrasi yang terpadu, keberadaan peraturan perundang-undangan yang memadai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama merupakan salah satu hal yang fundamental, tidak hanya untuk penyediaan aturan, namun juga untuk menyempurnakan.

Reformasi birokrasi di bidang peraturan perundang-undangan merupakan salah satu pilar penting yang menunjang keberhasilan tugas dan fungsi pelayanan Kementerian Agama, baik internal maupun

Reformasi birokrasi di bidang peraturan perundang-undangan merupakan salah satu pilar penting yang menunjang keberhasilan tugas dan fungsi pelayanan Kementerian Agama, baik internal maupun eksternal.



eksternal. Penataan peraturan perundang-undangan, dimulai dari inventarisasi dan kompilasi produk perundang-undangan di masa yang lalu yang masih relevan atau tidak dengan kebutuhan masa sekarang, sampai pada pembentukan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan.

Diantara peraturan yang menjadi bagian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Agama adalah:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Agama.

Terbitnya PMA ini untuk penyempurnaan dan penyesuaian dengan kondisi birokrasi dan zaman. Tidak dipungkiri bahwa tuntutan reformasi birokrasi dan perkembangan zaman mengharuskan penyesuaian struktur organisasi. Struktur organisasi yang dinamis dan sesuai membuat pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terlaksana dengan baik.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama.

Adanya pengaduan dan keluhan dari masyarakat, seperti pelayanan yang berbelit, cenderung birokratis, biaya yang tinggi, pungutan tambahan, perilaku aparat yang tidak menjadi abdi masyarakat dan pelayanan yang diskriminatif, menunjukkan bahwa pelayanan publik masih belum pada kondisi yang diharapkan. Di samping itu penyelenggaraan birokrasi yang tidak efektif,

terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme, serta rendahnya disiplin aparatur pemerintah merupakan dasar perlunya reformasi birokrasi pada bidang pelayanan.

Hal ini dijawab dengan terbitnya PMA Nomor 65 tahun 2016 ini, yang akan memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di Kementerian Agama.

Pelayanan terpadu adalah pemberian pelayanan terhadap satu atau beberapa jenis pelayanan yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen.

Pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Memperpendek proses pelayanan;
- c. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, akuntabel dan terjangkau; dan
- d. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan.

Pelayanan terpadu diselenggarakan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Pelayanan terpadu secara fisik dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan ini dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan untuk menyelenggarakan

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

- b. Pelayanan terpadu satu atap dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan dan/atau beberapa unit kerja penyelenggara pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara bersama pada satu tempat mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan di bawah satu atap.

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama.

Bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan kaidah-kaidah hukum yang berbentuk Keputusan dan Instrumen hukum lainnya sebagai bagian reformasi birokrasi disusunlah pedoman ini.

Penetapan suatu keputusan dalam bidang keagamaan merupakan suatu sistem, karena di dalamnya terdapat beberapa tahapan yang terjalin dalam suatu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Tahapan tersebut yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, dan tahap penyebarluasan.

Keputusan merupakan dasar hukum kegiatan dan segala kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dalam tahapan penyusunan Keputusan, baik di tingkat pusat maupun daerah pada Kementerian Agama, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada pada UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam Pasal 97 antara lain mengamanatkan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 berlaku mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Menteri.

Kondisi ini disebabkan karena lemahnya koordinasi pusat dan daerah dalam mensosialisasikan regulasi tentang penyusunan suatu Keputusan dan kurangnya pemahaman perancang dalam pembentukan Keputusan serta belum adanya metode yang pasti yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan suatu kaidah-kaidah hukum yang dituangkan dalam keputusan di lingkungan Kementerian Agama.

Untuk itu diperlukan pedoman sebagai acuan sehingga dalam penyusunan Keputusan dan Instrumen hukum lainnya pada Kementerian Agama dapat dilakukan dengan tertib, mempergunakan metode yang pasti, baku, dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang telah ditentukan.

KMA 777 tahun 2016 ini menjadi pedoman penyusunan rancangan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya bagi aparatur Kementerian Agama.

8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Oleh : H. Najwan Noor



Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.582 tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemenag 2015-2019. Selain hal tersebut, Sekjen Kemenag meminta jajarannya menyusun program strategis dengan berpedoman pada Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019. Dalam Road Map tersebut

ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019. Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah:

1. Mental Aparatur; Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah

perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku tersebut seperti dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan

mendorong terciptanya budaya kerja positif.

2. Pengawasan; Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.
3. Akuntabilitas; Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.
4. Kelembagaan; Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, peru-

bahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

5. Tatalaksana; Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.
6. SDM Aparatur; Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM ha-

rus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

7. Peraturan Perundang-Undangan; Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
8. Pelayanan Publik; Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

Manajemen Perubahan



1. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

- Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
- Terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel
- Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
- Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good gover-

nance

- Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
- SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
- Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN.

2.

Perubahan belum tentu membuat sesuatu menjadi lebih baik. Namun, tanpa perubahan, tidak akan ada pembaharuan, tidak akan ada kemajuan.

3.

Tahapan Sasaran Reformasi Birokrasi 2015 – 2019

- Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- Birokrasi yang efektif dan efisien
- Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

4.

Sasaran lima tahun kedua Implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama. Juga melanjutkan upaya yang belum dicapai pada lima tahun pertama pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah.

Mengapa Kementerian Agama Harus Reformasi Birokrasi ?

01.1998

- Krisis Multidimensi
- Reformasi Politik

02.2004

Tata Kelola birokrasi pemerintah berdasarkan Prinsip Good Government & Clean Government

03.2009

Untuk mewujudkan Prinsip Good Government & Clean Government Kementerian Agama mulai melakukan Reformasi Birokrasi

05.2015 - 2019

Implementasi Kementerian Agama harus sudah mengimplementasikan hasil capaian program reformasi birokrasi pada road map pertama & melanjutkan upaya yang belum dicapai (Road Map RB kemenag kedua)

04.2010 - 2014

Kementerian Agama harus melakukan penguatan birokrasi (Road Map RB Kemenag Pertama)

06.2010 - 2024

Kementerian Agama harus terus meningkatkan kapasitas birokrasi sebagai lanjutan dari Road Map RB Kedua (Road Map RB Kemenag Ketiga)

07.2025

Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayanan masyarakat dan abdi negara dengan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja (Dynamic Government)

5. Mengapa Kemenag harus Reformasi Birokrasi
 1. 1998
 - Krisis Multidimensi
 - Reformasi Politik
 2. 2004

Tata Kelola birokrasi pemerintah berdasarkan Prinsip Good Government & Clean Government
 3. 2009

Untuk mewujudkan Prinsip Good Government & Clean Government Kementerian Agama mulai melakukan Reformasi Birokrasi
 4. 2010 - 2014

Kementerian Agama harus melakukan penguatan birokrasi (Road Map RB Kemenag Pertama)
 5. 2015 - 2019

Implementasi Kementerian Agama harus sudah mengimplementasikan hasil capaian program reformasi birokrasi pada road map pertama & melanjutkan upaya yang belum dicapai (Road Map RB kemenag kedua)
 6. 2010 - 2024

Kementerian Agama harus terus meningkatkan kapasitas birokrasi sebagai lanjutan dari Road Map RB Kedua (Road Map RB Kemenag Ketiga)
 7. 2025

Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayanan masyarakat dan abdi negara dengan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja (Dynamic Government)
6. Peran Agen Perubahan
 - a. Sebagai Katalis

Memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kinerja yang lebih baik;
 - b. Sebagai Penggerak Perubahan

Mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 - c. Sebagai Pemberi Solusi

Memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik;
 - d. Sebagai Mediator

Membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
 - e. Sebagai Penghubung

Menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.



Ketua dan Seluruh Pengurus DWP Kanwil Kemenag Kalsel

Berfoto bersama usai memperingati Hari Kartini di Aula Kanwil Kemenag Kalsel

FOTO KERABAT



Menag RI Lukman Hakim Saifuddin bersama Ka.Kanwil Kemenag Kalsel Noor Fahmi, Tiba di Tempat Kegiatan Rakerwil Kemenag Kalsel 2018, di Hotel G-Sign Banjarmasin (26/02).



Menag RI bersama seluruh peserta Rakerwil mengucapkan yel-yel 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama.



Ka.Kanwil Kemenag Prov Kalsel menyampaikan laporan panitia penyelenggara di hadapan Menag RI dan seluruh peserta Rakerwil.



Menag RI Lukman Hakim Saifuddin, Menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Rakerwil Kememenag Kalsel.



RAKERWIL 2018
Kementerian Agama Prov. Kalsel



Menag RI membuka secara resmi kegiatan Rakerwil di dampingi Ka.Kanwil Kemenag Kalsel.



Menag RI didampingi Ka.Kanwil Kemenag Kalsel, menandatangani 10 prasasti KUA dilingkungan Kemenag Kalsel



Ka.Kanwil Kemenag Prov. Kalsel, menyampaikan materi di kegiatan Rakerwil Kemenag Kalsel



Ka.Kanwil Kemenag Prov Kalsel menerima Rekomendasi hasil sidang pleno rapat komisi Rakerwil Kemenag Kalsel, yang diserahkan oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan selaku panitia pelaksana Rakerwil.

Menag Resmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kemenag Jakarta



Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Peresmian berlangsung di Kanwil Kemenag, Jakarta, Selasa (27/02).

"Selamat. Semoga PTSP ini membuat Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta menjadi lebih dekat dengan masyarakat," ujar Menag.

Tampak hadir, Staf Khusus Menag Bidang Komunikasi Hadi Rahman, Kepala Biro Humas Data dan Informasi Mastuki, dan Sesmen Khoirul Huda Basyir.

"PTSP tidak hanya sebagai usaha meningkatkan pelayanan ke publik, tapi juga ke dalam ini usaha untuk menepis, menghilangkan hal-hal

yang selama ini bisa menjadi fitnah untuk kita," tutur Menag.

Menag berharap PTSP dapat memangkas urusan administrasi layanan birokrasi. Kalau sebelumnya proses layanan dilakukan melalui beberapa meja sehingga memunculkan berbagai prasangka soal biaya, ke depan tidak boleh lagi. "Dengan adanya PTSP selain mempercepat dan mempermudah publik, sekaligus juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas," imbuhnya.

Menag menegaskan bahwa pengembangan PTSP di satuan kerja Kementerian Agama akan terus dilakukan. Inovasi dibutuhkan untuk dapat mewujudkan pelayanan yang dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

"Pada akhirnya nanti, aktivitas administrasi sudah harus berbasis elektronik," tegas Me-

nag.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Saiful Mujab melaporkan, sekurangnya ada 10 layanan yang dapat dilayani pada loket PTSP, yaitu : Izin Belajar S1, Kenaikan Pangkat Reguler, Rekomendasi RPTKA, Permohonan Rohaniwan, Surat Masuk, Layanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Rekomendasi Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, Rekomendasi Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh, Informasi Verifikasi dan Sertifikasi Arah Kiblat, Izin Pendirian Lembaga Amil Zakat.

"Dengan keberadaan PTSP, kami berharap dapat memberikan layanan publik yang unggul. Ini sesuai dengan amanat reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama," tutur Saiful Mujab. (InmasDKI)

Menag Minta Kanwil Responsif terhadap Dinamika Generasi Muda

Banjarmasin (Kemenag) --- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta para Kanwil Kemenag untuk tanggap terhadap isu strategis yang berkembang di wilayahnya, utamanya terkait dinamika generasi muda. Menurutnya, anak muda Indonesia saat ini memegang peranan penting dalam perubahan bangsa, tidak terkecuali dalam mewarnai pemahaman keberagamaan.

"Pemahaman keagamaan (publik), sedikit banyak tergantung bagaimana anak muda kita memaknai dan mempersepsikan agama. Kita pasti akan menjadi tua, tapi kita harus gaul dan mampu memahami dunia anak muda," tandas Menag saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Senin (26/02).

Menag harap, peserta Rakerwil mampu menangkap isu strategis lalu meresponnya dengan lebih inovatif, utamanya hal-hal yang menyita perhatian dan disukai kawula muda. "Menjaga dan memelihara warisan leluhur yang baik, itu penting, tapi tidak cukup. Kita juga harus berkreasi, berinovasi untuk melahirkan hal-hal yang sesuai dan menjadi tuntutan masyarakat," tuturnya.

"Saya berharap, pada Rakerwil ini kali, agenda yang telah disusun berdasarkan asumsi tahun lalu, silahkan disesuaikan, diteguhkan dan ditegaskan, apakah asumsi yang melatarbelakangi sejumlah rancangan program disusun dan dibuat, tetap masih mempunyai relasi



tinggi terhadap hal-hal kekinian yang dibutuhkan masyarakat?" lanjutnya.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenag Provinsi Kalsel Noor Fahmi melaporkan bahwa Rakerwil yang mengusung tema: Melalui Raker, Kita Tingkatkan Profesionalisme dan Ikhlas Melayani Mewujudkan Integritas Kinerja Kemenag tersebut akan berlangsung 26 - 28 Februari 2018.

"Ada 500 peserta pada Raker 2018 ini, yang terdiri dari para pejabat di Kanwil, para kepala kankemanag kabupaten/kota, kepala KUA, penyuluh, pengawas, kepala madrasah dan lainnya. Kami berkumpul untuk menyamakan ide, membahas isu-isu aktual dan strategis pencapaian program Kemenag Kalsel," terang Kakanwil.

Kakanwil berharap Rakerwil ini berpengaruh positif

dalam meningkatkan kualitas kinerja ASN Kemenag dalam melayani dan semakin profesional.

Selain membuka Rakerwil, Menag juga meresmikan 10 Balai Nikah dan Manasik Haji yang dibangun dengan menggunakan dana SBSN Tahun 2017. Ke-10 Balai Nikah tersebut adalah KUA Kandangan dan KUA Simpur (Kabupaten Hulu Sungai Selatan), KUA Barabai dan KUA Haruyan (Kabupaten Hulu Sungai Tengah), KUA Binuang dan KUA Candi Laras Selatan (Kabupaten Tapin), KUA Mantewe dan KUA Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu), KUA Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan KUA Kelua Kabupaten Tabalong.

Ikut hadir pada Rakerwil, Staf Khusus Menag Gugus Joko Waskito, Direktur Diktis Arskal Salim dan Kapus Lektur Keagamaan M Zain.

Kemenag Hadir Untuk Fasilitas Umat Jalankan Ajaran Agama



Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Kementerian Agama hadir untuk memfasilitasi umat melaksanakan ajaran agamanya.

“Kemenag hadir memfasilitasi umatnya untuk melaksanakan kewajiban ajaran agamanya,” kata Menag Lukman saat menjadi pembicara pada talk show di IDN Times, Jakarta, Selasa (13/03).

Selaku host pada acara ini adalah Jovial Da Lopes. Kepada Jovial, Menag mencontohkan soal penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, karena umat Islam yang mampu berkewajiban menjalankan ibadah haji,

maka negara wajib memfasilitasi warganya agar bisa berangkat ke Makkah dan Madinah.

Ketika ditanya Jovial tentang *Diversity is Beautiful*, Menag mengungkapkan bahwa itu adalah ungkapan penuh makna. Keragaman bahkan tidak semata indah, namun juga anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia agar hidupnya lebih berkualitas.

“Keragaman adalah keniscayaan untuk kita saling mengisi. Mari kita maknai keragaman untuk lebih mengedepankan makna keragaman itu. Tidak hanya indah, tapi betul-betul tidak terhindarkan dari kehidupan

kita bersama,” tuturnya.

Bagi Menag, esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia dan menebarkan kebaikan. Karenanya, tidak ada alasan apapun, untuk melakukan tindakan kekerasan pada agama lain. “Jangan sampai seseorang rajin menjalankan ibadah, tapi masih ekstrim, korupsi dan lainnya,” ujar Menag.

Talk show IDN Times membincang banyak hal, mulai dari kehidupan keagamaan, keragaman, juga *Diversity is Beautiful*. Talk show berlangsung di studio IDN Times di bilangan Jalan Palmerah Utara nomor 62 A, Jakarta.

Presiden Ingatkan Masyarakat Bijak Gunakan Dana dari Bank Wakaf Mikro

Serang (Kemenag) - Ada hal menarik saat Presiden mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada Rabu, 14 Maret 2018. Presiden Joko Widodo menyempatkan untuk berdialog dengan nasabah Bank Wakaf Mikro. Salah satunya adalah Ibu Bahiyah dari Kampung Tanara.

"Saya ingin kira-kira kalau minta tambahan modal dapat nggak dari Bapak?" tanya Ibu Bahiyah kepada Presiden.

"Kok tambahan modal dari saya? Ini ibu-ibu disiapkan Bank Wakaf Mikro digunakan sebaiknya karena dalam bank ini disiapkan uang banyak. Jadi kalau nanti sudah dilihat usaha berkembang bisa saja enam bulan ditambah lagi, yang kita harapkan itu. Jangan tambahan minta dari Presiden," jawab Presiden santai.

Seperti diketahui, selain untuk bersilaturahmi, kedatangan Presiden juga untuk meresmikan Bank Wakaf Mikro. Program ini bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat di tingkat mikro mulai dari Rp1 juta.

"Satu juta untuk apa? Jualan apa? Hanya sembako saja? Cukup? Gak cukup? Sembako saja masa sejuta gak cukup? Cukup lah. Jualan sembako pinjam sini sejuta. Seminggu angsur berapa? Rp26 ribu. Berat gak? Endak," lanjut Presiden.

Presiden juga mengingatkan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut untuk berhati-hati dalam urusan meminjam



uang.

"Saya titip jangan sampai ibu-ibu terjat di rentenir karena di sana bunga sangat tinggi. Rentenir berapa bunganya? Di luar bisa 30 sampai 40 persen per tahun. Di Bank Wakaf Mikro hanya ada biaya administrasi 3 persen. Itu setahun loh. Tidak ada bunganya," katanya.

Di ujung dialog, Presiden juga mengingatkan agar masyarakat bijak menggunakan dana pinjaman dari Bank Wakaf Mikro.

"Tapi yang paling penting kalau dapat modal dari Bank Wakaf Mikro penggunaannya untuk usaha. Jangan sampai dapat sejuta yang 500 ribu beli pakaian. Wah biar cantik beli pakaian mahal. Semua gu-

nakan untuk usaha. Bank Wakaf Mikro ini dibentuk OJK untuk bantu ibu-ibu semua. Dana di sini dari donasi Pak Datuk Tahir supaya betul-betul digunakan sebaik-baiknya sehingga usaha berkembang," pungkas Kepala Negara.

Setelah berdialog dengan nasabah Bank Wakaf Mikro, Presiden meninjau ritel konsinyasi modern LEU Mart dan dicetuskan oleh Lembaga Ekonomi Umat (LEU) yang berada di pondok pesantren tersebut.

Dalam acara ini, Presiden didampingi oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia/Pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara KH Ma'ruf Amin.

Ka. Kanwil Pinta Ka.Kankemenag Se Kalsel Segera Realisasikan PTSP

Banjarmasin (Kemenag Kalsel) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel H. Noor Fahmi menegaskan kepada para Kepala Kantor Kemenag (Ka. Kankemenag) Kabupaten dan Kota se Kalsel, agar segera merealisasikan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Menurut Fahmi PTSP tersebut merupakan program unggulan Menag yang harusnya sudah dapat direalisasikan di akhir tahun 2017 kemarin, karenanya program PTSP tersebut menjadi isu strategis dan unggulan untuk menjadi salah satu materi pembahasan yang telah diagendakan pada Rakerwil Kemenag Kalsel tahun 2018 disamping isu-isu strategis lainnya.

"Dengan adanya Rekomendasi, atas hasil dari sidang komisi pada pelaksanaan

Rakerwil ini, saya mengharapkan, upaya pelaksanaan PTSP di Kemenag provinsi dan daerah se Kalsel dapat segera kita realisasikan bersama, meskipun dengan keterbatasan anggaran dan sarana," katanya pada malam penutupan kegiatan Rakerwil Kemenag Kalsel di Hotel G. Sign Banjarmasin, Selasa (27/02/18).

Selanjutnya terkait isu strategis lainnya yang tertuang pada rekomendasi yang dibacakan pada malam pleno perwakilan dari 6 Komisi sidang, diantaranya tentang Pembayaran Non Tunai, Elektronik PAI, Pendidikan Madrasah, Pelayanan Haji, Zakat dan Wakaf serta tentang Sarana dan Prasarana penunjang dan lainnya, Fahmi mengharapkan, sebelum direkomendasikan ke pusat, agar rekomendasi tersebut dapat di seamlurnakan lagi.

"Saya pinta kepada panitia

pelaksana Rakerwil agar dapat membentuk tim perumus rekomendasi sebelum rekomendasi tersebut didokumentasikan, agar hasilnya benar-benar baik," pintanya.

Menanggapi hal tersebut, panitia pelaksana Rakerwil H. Safrudin mengatakan, dalam waktu dekat akan segera membentuk tim perumus. "Nanti akan kita bicarakan lagi tentang teknis pembentukan tim perumus tersebut," katanya kepada tim web kemenagkalsel.go.id saat di konfirmasi.

Sebelumnya H. Safrudin yang menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Kanwil Kemenag Kalsel tersebut telah menerima semua hasil rekomendasi dari peserta Rakerwil untuk selanjutnya diterahtkannya kembali kepada Ka. Kanwil Kemenag Kalsel. (Rep/Ft: Inmas18)





Ka.Kanwil Pinta ASN Kemenag Tidak Terlibat Travel Ilegal

Banjarmasin (Kemenag Kalsel) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel H. Noor Fahmi meminta kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag agar tidak terlibat dengan travel ilegal.

“Jangan ikut jadi jemaah, apalagi sampai jadi pembimbing ibadah,” tegas Fahmi di Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kemenag Kalsel Tahun 2018, Senin (26/02/18) di G’Sign Hotel Banjarmasin.

Fahmi menegaskan ASN Kemenag harus menjadi contoh dimasyarakat dan turut mesosialisasikan travel yang memiliki izin resmi dalam penyeleng-

garan umrah dan haji khusus agar masyarakat selektif dalam memilih travel haji dan umrah. “Kalau ASN ikut travel ilegal itu sama artinya dengan melegalakan yang ilegal,” tegasnya lagi.

Saat ini banyak travel perjalanan umrah yang menawarkan perjalanan umrah dengan biaya murah dan di Kemenag Kalsel saja tercatat ada 43 travel yang memiliki izin resmi per 11 Desember 2017.

Masih banyaknya travel ilegal, diakui Fahmi berpotensi menimbulkan masalah. Untuk itu dia berharap masyarakat tidak sungkan-sungkan mencari informasi dan mengecek di Kemenag, travel umrah mana

saja yang rekam jejaknya baik, aman, dan terpercaya.

Tingginya animo masyarakat terhadap ibadah umrah dan haji khusus saat ini juga tidak terlepas dari lamanya masa tunggu haji regular yang mencapai 27 tahun. Untuk itu Fahmi mengimbau semua pihak, khususnya ASN Kemenag membantu menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang benar dan aman.

“Pastikan izinnya, pastikan penerbangan dan jadwal keberangkatan, pastikan program layanannya, pastikan hotelnya, dan pastikan visanya,” tukasnya. (Rep/ Ft: Inmas18)

SPAK, Program Prioritas DWP Kemenag Kalsel 2018



Banjarmasin (Kemenag Kalsel) – Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), sebuah gerakan moral yang lahir dari keprihatinan atas survey yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2011-2012 di Yogya dan Solo yang menyajikan fakta bahwa hanya 4% orang tua yang mengajarkan kejujuran terhadap anaknya.

Kementerian Agama (Kemenag) menjadi Pioneer, Kementerian yang pertama kali melibatkan Dharma wanitanya menjadi agen-agen SPAK dan Kementerian yang membuka pintunya lebar-lebar terhadap gerakan SPAK.

Menindak lanjuti program yang mendapat dukungan Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin dan Ibu Trisna Willy Lukman Hakim Syaifuddin selaku penasehat Darma Wanita

Persatuan (DWP) Kemenag tersebut, DWP Kemenag Kalsel menetapkan SPAK sebagai program prioritas di tahun 2018 dibawah kepemimpinan Hj. Siti Mariani Noor Fahmi.

Program tersebut menurut Hj. Siti Mariani merupakan gerakan yang sifatnya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi bukan penindakan dan pihaknya telah berkomitmen untuk melakukan perubahan dimulai dari diri sendiri untuk taat terhadap segala peraturan yang berlaku dan mengembangkan pengetahuannya terhadap perilaku koruptif yang harus dihindari.

“Gerakan ini merupakan wujud revolusi mental menuju Indonesia yang bebas dari korupsi,” ujar ketua DWP Kemenag Kalsel tersebut saat melakukan sosialisasi SPAK kepada pengurus DWP

Kemenag se Kalsel, Selasa (27/02/18) di hotel G’Sign Banjarmasin.

Tidak hanya sampai disitu, DWP Kemenag Kalsel juga memprogramkan sosialisasi SPAK di tingkat Kemenag Kab/ Kota se Kalsel melalui berbagai permainan dan alat peraga yang dilaksanakan minimal tiga kali dalam setahun.

“Jadi nanti kita keliling ke DWP Kemenag Kabupaten kota se Kalsel untuk memantapkan program ini,” tukasnya.

Selain memprogramkan sosialisasi SPAK ke Kemenag Kabupaten/Kota, DWP Kemenag Kalsel juga merencanakan pembuatan seragam SPAK sebagai wujud komitmen DWP Kemenag Kalsel terhadap program yang pertama kali diseminarkan 1 Maret 2016 tersebut. (Rep/ Ft: Inmas18)

Bina ASN, Sekjen Tekankan Konsep Kebersamaan

Banjarmasin (Kemenag Kalsel) - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag) RI Nur Syam melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (27/03/17) malam di hotel Victoria Banjarmasin.

Dipembinaannya, Nur Syam menekankan empat konsep kebersamaan dalam bekerja untuk membuat citra Kemenag lebih baik lagi.

“Berawal dari coming together, share together, walking together maka akan didapatkan success together,” ucapnya di hadapan 160 orang ASN di lingkungan Kemenag Kalsel.

Menurut Nur Syam,

dengan niat kebersamaan (coming together) pekerjaan akan lebih mudah dan jika ada masalah-masalah internal bisa diselesaikan bersama-sama pula (share together).

“Jangan sampai ketika ada masalah, kita malah mengundang pihak luar untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Ditambahkannya, sekarang ASN tidak bisa lagi mengandalkan solidaritas mekanis, karena sekarang eranya solidaritas organis yang menuntut ASN bekerja sesuai dengan tupoksinya dalam rangka mencapai visi organisasi (Kemenag). “Semua bekerja sesuai dengan perannya, tidak bisa lagi mengandalkan system kekrabatan atau kekeluargaan,” jelasnya.

Selanjutnya ia mengimbau ASN Kemenag Kalsel agar menegakkan integritas, membina profesionalitas dan menumbuhkan inovasi dalam bekerja. “Karena tidak ada yang namanya prestasi individu, tapi jika ada prestasi itu adalah prestasi bersama,” jelasnya.

Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah (Ka.Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel H. Noor Fahmi dalam sambutannya mengharapkan agar ASN Kemenag bisa melaksanakan arahan yang disampaikan Sekjen. “Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan kualitas diri dengan adanya pembinaan ini,” harapnya. (Rep/ Ft: Inmas18)



Ka.Kankemenag Pinta ASN Harus Netral



Banjarmasin (Kemenag Kalsel) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) kota Banjarmasin Muhammad Rofi'i meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag Kota Banjarmasin untuk bersikap netral terhadap isu – isu yang berkembang pada Pemilu pada tahun 2018 dan 2019.

“Sebagai seorang ASN kita harus netral terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat dengan artian tidak memihak kepada siapapun dan partai apapun,” ujar Rofi'i saat menjadi pembina pada upacara apel gabungan, Senin (05/03/18) di halaman Kantor Kemenag Kota Banjarmasin.

Menurut Rofi'i, ASN sudah seharusnya menjaga netralitas dan tidak ikut-ikutan dalam mendukung suatu partai tertentu, apalagi yang berkenaan dengan kampanye negatif dan kampanye hitam yang biasanya marak mendekati Pemilu pada serentak.

“Ditambah isu berbau Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) serta kampanye hitam merupakan hal berbahaya dan dapat merusak stabilitas sosial dan keamanan,” jelasnya.

Lebih jauh Rofi'i meminta peran serta ASN dalam berbagai kesempatan untuk mampu men-

gajak dan menciptakan suasana damai kepada masyarakat guna menjaga suasana yang kondusif.

“ASN di Kemenag kota Banjarmasin tentunya dituntut juga berperan aktif serta ikut berperan nyata yang ditunjukkan dengan menjaga sikap yang netral, mendedahkan hati masyarakat, dengan harapan tercipta suasana yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu nanti,” tukasnya.

Apel gabungan merupakan apel rutin bulanan yang dilaksanakan Kemenag Kota Banjarmasin dan diikuti seluruh Satker di Lingkungan Kemenag Kota Banjarmasin. (Rep: Rahmani/Ft: Abdi)

Ka.Kankemenag: Kemenag Siap Fasilitasi Ormas



Banjarbaru (Kemenag kalsel) -Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kota Banjarbaru H. Zainal Ilmi menyatakan Kemenag Banjarbaru siap memfasilitasi organisasi yang ingin mengajukan surat rekomendasi pengajuan dana kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, memberikan akses kemudahan bagi lembaga atau organisasi mengajukan bantuan dana merupakan kewajiban Kemenag selaku pelayan masyarakat.

“Setidaknya dengan rekomendasi dari Kemenag, akan menjadi pertimbangan penting bagi instansi yang mengeluarkan dana,” kata Zainal saat menerima tamu dari keder Nnahdatul Ulama (NU), Kamis

(08/03/18 di ruang kerjanya.

Ditambahkannya, surat rekomendasi bisa diberikan kepada organisasi yang benar benar sudah memiliki badan hukum secara nasional seperti Muhammadiyah dan NU yang merupakan basis organisasi paling besar yang aktif di masyarakat.

“Bukan hanya NU dan Muhammadiyah saja, siapapun boleh mengajukan dana dengan catatan organisasi benar benar ada dan terdaftar,” tandasnya.

Sementara Mushlih, salah satu kader NU Banjarbaru di jumpai usai menemui Ka.Kankemenag mengatakan bahwa kebutuhan dana bagi organisasi tidaklah kecil salah sa-

tunya yakni sebagai penyokong kegiatan operasional di lingkungan internal keorganisasian.

“Kebutuhan akan dana tiap tahun menjadi kebutuhan yang pasti dalam menjalankan sayap dakwah organisasi, sehingga dukungan dari Kemenag sangat diperlukan membangun sinergitas berorganisasi,” kata Mushlih.

Pekerjaan rumah yang saat ini menjadi persiapan bagi kemenag ialah monitoring usai mengeluarkan surat rekomendasi pengajuan dana dan Kemenag sebagai pihak perekomendasi bertanggung jawab secara tidak langsung melalui pengawasan dari laporan yang di berikan oleh internal organisasi masing-masing. (Rep/ Ft : Humas)

Ka.Kankemenag Tapin Lantik Empat Kamad



Rantau (Kemenag Kalsel) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Tapin H. Mahrus melantik empat Kepala Madrasah (Kamad), Kamis (22/03/18) di aula Hudaibiyah Kemenag Tapin.

Pelantikan diawali dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) dari Ka.Kankemenag Tapin setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan SK.

Dalam sambutannya Ka.Kankemenag mengucapkan

selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan berharap amanah yang diberikan bisa dilaksanakan dengan baik. "Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas," harapnya.

Lebih lanjut Ka.Kankemenag mengatakan ditempat tugas yang baru para Kamad dapat beradaptasi dan berkomunikasi, terlebih dengan tokoh masyarakat setempat, sehingga program yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik. "Terus berinovasi untuk menjadikan madrasah hebat, madrasah bermartabat," katanya.

Sementara itu Analis Kepegawaian Kankemenag Tapin H. Samsul Bahri mengatakan Kamad yang dilantik berjumlah empat orang yaitu Hairani Firani yang asalnya Kepala MTsN 5 Tapin dilantik menjadi Kepala MAN 1 Tapin, H Hamsi Yahya yang asalnya Kepala MTsN 4 Tapin dilantik menjadi Kepala MAN 3 Tapin, M Abdul Kholik asalnya Kepala MAN 3 Tapin dilantik menjadi Kepala MTsN 5 Tapin kemudian Zailani asalnya Kepala MTsN 6 Tapin dilantik menjadi Kepala MTsN 4 Tapin. (Rep/Ft:Very)

Ka.Kankemenag LantikKepala Urusan Tata Usaha MTsN dan MAN

Martapura (Kemenag Kalsel) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka. Kankemenag) Kabupaten Banjar Drs.H. Izzuddin, M.Ag melantik Kepala Urusan Tata Usaha MTsN dan MAN, Jum'at (23/03/18) di aula Kankemenag Banjar.

H. Izzuddin pada sambutannya mengucapkan selamat kepada semua Kepala Urusan Tata Usaha MTsN dan MAN yang dilantik. "Ini merupakan tugas sebagai Kepala Tata Usaha pada madrasah untuk selalu bekerja sesuai dengan topoksinya," ungkapnya.

Selanjutnya H. Izzuddin berharap semua Kepala Urusan Tata Usaha agar kiranya selalu

bekerja sama dengan baik kepada Kepala Madrasah sebagai atasan langsung. "Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan pada Madrasah serta selalu memperhatikan terhadap lingkungan masyarakat setempat." katanya.

Sementara Kasubbag TU H.Imam Ghazali MM menyebutkan enam pejabat yang dilantik hanya mutasi alih tugas sebagai Kepala Urusan Tata Usaha MTsN dan MAN di lingkungan Kabupaten Banjar.

H.Imam Ghazali meminta Kepada para pejabat yang dilantik bisa menciptakan semangat untuk bekerja melakukan yang terbaik dengan suasana yang baru pada

madrasah yang ditempatinya untuk mewujudkan pendidikan yang lebih maju.

Kepala Urusan Tata Usaha yang dilantik yaitu Abdul Khair,S.H.I Ka.TU MtsN 5 Banjar, Miswari Ka.TU MTsN 6 Banjar, H.Ali Fitriansyah,S. Ag.MM Ka.TU MTsN 1 Banjar, Ahmad Husaini,S. Pd.MM Ka.TU MTsN 2 Banjar, Muhammad Yamani,S. Ag.MM Ka TU MAN 4 Banjar, Irnawati,S.Ag MAN 2 Banjar.

Pelaksanaan Pelantikan dihadiri Kepala Seksi dan Penyelenggara, para Staf Pelaksana urusan Ortala dan Kepegawaian Seluruh Kepala MTsN, MAN di Lingkungan Kabupaten Banjar. (Rep: Anzay/ Ft: Rizqia)



Ka.Kankemenag: Pelayanan Terpadu, Komitmen Kemenag

Kandangan (Kemenag Kalsel) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Drs. H. Saribuddin, M.Pd.I mengatakan layanan terpadu merupakan wujud dari komitmen untuk melakukan perubahan agar menjadi lebih dekat dalam melayani masyarakat.

"Pelayanan yang sesungguhnya yaitu bagaimana kita harus mampu memberikan kepuasan dan kesenangan kepada orang yang kita layani bukan mementingkan kesenangan kita," ujar H.Saribuddin dihadapan

pan Karyawan Kemenag HSS, Senin (12/03/18) di Halaman Kantor Kemenag Kab. HSS.

Menurut H. Saribuddin, Kemenag telah berkomitmen melakukan peningkatan pelayanan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu agar masyarakat mendapatkan akses pelayanan dengan mudah dan mempersingkat waktu serta pelayanan dilakukan terbuka dan transparan.

"Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan perubahan dalam sistem pelayanan

dan kita harus berani untuk melakukannya walaupun memang pertama akan terasa berat dan susah akan tetapi percayalah lama kelamaan pasti akan terbiasa," pungkasnya.

Sementara Kepala Sub. Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Drs. H.Abd Haris, M.Pd.I mengatakan pelayanan satu pintu sangatlah penting dilakukan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat," tuturnya. (Rep/ Ft: Bahrul)





Ka.Kankemenag: ASN Kemenag Harus Semangat dalam Bertugas

Amuntai (Kemenag Kalsel) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) H.Matnor, MPd menegaskan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag apalagi tenaga pengajar tidak boleh bermalas malasan dalam bertugas.

“Kita harus bersemangat dalam bertugas,” tegas H.Matnor saat memberikan arahan pada kegiatan pembinaan tenaga pengajar MI se Kecamatan Amuntai Utara di MIN 22 HSU, Senin (06/03/18).

H.Matnor mengatakan

seorang guru harus bisa berfikir jernih, kapan lagi mengabdikan diri didunia pendidikan jika bukan sekarang. “Ilmu yang kita berikan kepada anak didik akan menjadi amal jariyah di akhirat kelak,” tambah H.Matnor.

Di akhir arahnya, H.Matnor menjelaskan apabila seorang guru salah dalam memberikan pengajaran kepada siswa, bisa mengakibatkan siswa juga salah dalam menerapkannya di kemudian hari. “Ibarat pepatah guru kencing berdiri maka murid kencing berlari,” pungkas H.Matnor di akhir arahnya.

Sementara Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Kemenag HSU H.Nasrullah.HR,MM yang turut mendampingi Ka.Kankemenag menegaskan agar para guru dan kepala madrasah dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus meningkatkan output dan outcomes.

H.Nasrullah menambahkan sebagai ASN memiliki hak dan kewajiban. “Pemerintah telah menunaikan hak kita melalui pembayaran gaji dan tunjangan, maka kewajiban kita melaksanakan tugas sepenuh hati,” tukas H.Nasrullah. (Rep: Lati-ful Ft: Raihan)

Kankemenag Balangan Dukung Upaya Ketahanan Pangan



Paringin (Kemenag Kalsel) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka Kankemenag) Kabupaten Balangan H Muhammad Yamani menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah daerah Kabupaten Balangan untuk terus mengupayakan ketahanan pangan di Bumi Sanggam.

Menurutnya, Ketahanan pangan erat kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga, karena itu disetiap pembinaan KUA terhadap calon pengantin selalu menekankan tentang kemandirian ekonomi dan salah satunya adalah dengan Ketahanan Pangan.

"Beberapa kasus perceraian berhubungan dengan ketahanan pangan, karena itu dengan adanya kemandirian dari tiap pasangan setidaknya akan menghindari perceraian yang

dikhawatirkan menjurus ke perceraian," ujar Ka. Kankemenag saat mengikuti panen raya bersama Wakil Bupati dan seluruh unsur SKPD lingkup Kabupaten Balangan di desa Baruh Panyambaran Kecamatan Halong, Kamis (8/2/18).

Lebih lanjut Ia juga menyampaikan selamat atas keberhasilan panen raya di Balangan serta mengharapkan agar para petani tidak lupa untuk menyukurinya.

"Meski sempat terkena banjir namun seperti yang kita saksikan bersama petani bisa melakukan panen raya, semoga kedepan bisa lebih baik lagi," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Balangan H Syaifullah mengatakan persediaan cadangan beras di Kabupaten Balangan kurang lebih mencapai 6

bulan sudah mencukupi untuk kebutuhan beras di Bumi Sanggam, dan dengan panen raya tersebut persediaan beras juga meningkat.

"Pertanian di Balangan merupakan penyumbang nomor ke 2 setelah tambang, oleh karena kami akan selalu mendukung diantaranya tahun 2019 pemerintah akan memberikan mesin panen traktor," ungkapnya.

Selain dihadiri oleh Wakil Bupati Balangan, turut berhadir Dandim 1001 Amuntai, perwakilan Kejari Balangan, Kepala Dinas Pertanian, perwakilan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Camat Halong, SKPD dan para warga setempat yang hadir. Acara diawali dengan panen padi dengan mesin panen traktor. (Rep/Ft:Humas)

Efektifkan Kinerja ASN, Kemenag Tabalong Gelar Pembinaan Kepegawaian

Tanjung (Kemenag Kalsel) – Guna mengefektifkan pengawasan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tabalong, bagian Kepegawaian Kantor Kemenag Tabalong menggelar pembinaan Kepegawaian tahun 2018 tentang laporan kinerja berbasis E-Kinerja, Senin (05/03/18).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Kemenag Tabalong tersebut dihadiri 100 orang peserta yang berasal dari Madrasah Negeri dan swasta, KUA Kecamatan se- Kabupaten Tabalong, dan karyawan Karyawati Kantor Kemenag Tabalong.

Kepala Kantor Kemenag

Tabalong H. Taufik Rahman, S.Ag, M.Pd saat membuka acara tersebut mengatakan e-Kinerja merupakan aplikasi elektronik yang digunakan untuk penilaian kinerja dari ASN dalam upaya memberikan apresiasi dan pengakuan atas kinerja pegawai menjadi perhatian BKN dalam mewujudkan pelaksanaan merit system melalui e-kinerja. “E-Kinerja ini akan diinput secara online atau daring,” ungkapnya.

Dikatakan H. Taufik, tujuan dari pengisian melalui aplikasi e-kinerja memudahkan para PNS melaporkan target sasaran kerja pegawai (SKP) yang harus disusun diawal tahun kerja kepada Kepala Kantor Kemenag secara online.

“Selain itu ada e-personal yang memungkinkan PNS untuk mengirim penambahan atau perubahan data kepegawaian. Sedangkan lewat aplikasi e-file, PNS dapat memantau file kepegawaian masing-masing,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menambahkan dengan adanya aplikasi e-kinerja, diharapkan adanya kepastian bagi para pegawai yang menunjukkan kinerja baik dengan mendapatkan apresiasi yang baik pula. “Demikian juga sebaliknya, bagi pegawai dengan kinerja buruk mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang dilakukan,” harapnya.

Sementara staf bagian kepegawaian Kemenag Tabalong Hariadi menjelaskan penerapan e-kinerja adalah langkah terobosan untuk meningkatkan kinerja ASN yang profesional. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan secara umum di mata masyarakat luas.

“Aplikasi e-kinerja ini dapat mempermudah PNS membuat laporan kinerja yang terintegrasi. Sekaligus memberikan rekomendasi dalam bentuk data kepada pimpinan untuk pembenahan tata kelola organisasi,” terangnya.

Hariadi berharap tahun ini pelaksanaan e-Kinerja segera terealisasi di lingkungan Kemenag Tabalong sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. (Rep: Yani/ Ft: Sry)



MUI Batola akan Keluarkan Fatwa Sesat Majelis NIKPI



Marabahan (Kemenag Kalsel) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabuapten Barito Kuala (Batola) segera mengeluarkan fatwa sesat terhadap Majelis Dzikir Nur Insan Kamil Pernapasan Istiqna (NIKPI).

Ketua MUI Batola Drs.

KH. Husain Akhmad mengatakan keberadaan Majelis NIKPI yang dianggap melenceng dari Islam dan telah meresahkan warga setempat menjadi alasan MUI untuk sesegera mungkin mengeluarkan fatwa.

“Tahun kemaren sempat ada dialog dengan pengurus NIKPI, dan beberapa kali dengan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Marabahan,” ujarnya dirapat yang digelar di aula Al Ikhlas Kamis (08/03/18).

Menurut KH. Husai ke-

beradaan mereka cukup meresahkan masyarakat Desa Jambu, Marabahan dan Barambai. “Masyarakat jadi merasa tidak nyaman, karena ada yang berbeda dengan ajaran umat Islam secara umum,” ujarnya.

Meski akan mengeluarkan fatwa ajaran sesat, KH Husain Akhmad mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan dapat menjaga kondusifitas. “Kami juga tidak mau terjadi ribut-ribut dan membuat Batola jadi tidak kondusif. Jadi kami minta yang bertindak adalah pemerintah. Masyarakat harus tetap tenang,” pesan Husain Akhmad. (Rep/ Ft: Masgun)

Ka.Kankemenag Pinta ASN Tingkatkan Kewaspadaan Keamanan

Pelaihari (Kemenag Kalsel) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Tanah Laut (Tala) Drs. H. Rusbandi, MA meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya penyuluh agama untuk segera menindak lanjuti edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) tentang pengamanan masjid dan musholla.

Menurut H. Rusbandi, edaran tersebut sehubungan dengan makin maraknya kasus-kasus tindak kekerasan terhadap pemuka agama akhir-akhir ini, karenanya masyarakat diharapkan selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat, meningkatkan kewaspadaan setiap ada hal-hal yang mengancam, meningkatkan kemakmuran masjid serta mel-

aporkan perkembangan situasi keamanan pada pihak berwajib.

“Mari kita tingkatkan kewaspadaan kita terhadap lingkungan sekitar demi terciptanya Indonesia yang aman dan damai,” ujarnya saat memberikan arahan pada apel Senin (12/03/18) di halaman Kankemenag Tala.

Hal senada disampaikan Kasi Bimas Islam H. Zairin Fanzani, S.Ag yang mengharapkan kepada seluruh penyuluh agama di lingkungan Kankemenag Tala dapat mensosialisasikan edaran tersebut kepada seluruh pengurus masjid di wilayah binaan masing-masing.

Lebih lanjut Zairin mengatakan Penyuluh ag-



ama merupakan garda terdepan Kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. “Mari kita bahu membahu berkerjasama guna terciptanya kedamaian Indonesia khususnya Bumi Tuntung Pandang,” ajaknya saat ditemui usai apel yang diikuti Kasubag Tata Usaha, seluruh kepala seksi, pengawas sekolah, penyuluh agama, dan karyawan Kankemenag Tala. (Rep: Tini/ Ft: Munir)

Ka.Kankemenag Pinta Kaur TU Pahami Tupoksi



Batulicin (Kemenag Kalsel) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Drs.H.Abdul Basit, MM meminta Kepala Urusan Tata Usaha (Kaur TU) dapat memahami tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) dalam mengemban amanah.

Hal itu disampaikan saat menyampaikan arahan usai Pelantikan Kaur TU Madrasah di Lingkup Kemenag, Jumat (23/03/18).

Orang nomor satu di Kemenag itu juga menuturkan pada pelantikan yang digelar di Aula Kemenag tersebut, ada beberapa poin penting terkait tugas dari Kaur TU yakni, mengatur administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana, kesiswaan, persuratan, serta yang tak kalah penting yakni keuangan, dimana Madrasah menge-

lola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sertifikasi guru, sehingga Kaur TU harus bisa menjalin komunikasi dengan semua pihak terkait hal itu. “Semoga dapat meningkatkan kualitas layanan ketatausahaan di madrasah,” harapnya.

Disamping itu, Mantan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) juga berharap, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dilantik dapat menjalankan amanah semaksimal mungkin, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. “Pelayanan yang baik tercermin dari kinerja TU yang baik,” tandasnya.

Ditambahkan, Kasubbag TU H. Mahmud, S.HI usai membacakan SK Pelantikan, Kaur TU perlu mengembangkan tugas-tugasnya dan banyak melakukan koordinasi, serta

harus bersinergi dengan Kamad untuk menjalankan program yang telah direncanakan.

Mahmud juga mengimbau Kaur TU untuk dapat mengelola pengadministrasian madrasah secara maksimal. “Kelola dengan baik sesuai aturan yang berlaku, agar tidak terjadi masalah dikemudian hari,” pungkasnya.

Kaur TU yang dilantik yakni Nur Ainun, S.Ag sebagai Kaur TU MAN Tanbu yang sebelumnya merupakan Kaur TU pada MTsN Tanbu dan Tamrin, S.Pd.I yang sebelumnya Penyusun Laporan Keuangan MTsN I naik menjadi Kaur TU MTsN 1 Tanbu.

Pelantikan disaksikan seluruh Kasi, Kamad, Kepala KUA, pengawas dan ASN lainnya. (Rep/Ft:Risna)

Kemenag Kotabaru Gelar Pembinaan Guru Agama Katolik

Kotabaru (Kemenag Kalsel) - “Guru Agama harus mampu membimbing anak didiknya supaya tidak terpengaruh paham yang menyimpang,” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.KanKemenag) Kabupaten Kotabaru Drs. H. Salman, MM saat membuka Bimbingan dan Pembinaan Guru Agama Katolik PNS dan Honorer di Lingkungan Kankemenag Kotabaru, Senin (05/03/18) di Meeting Room Hotel Kartika Kotabaru.

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, mengembangkan kesehatan dan akhlak mulia dari peserta didik.

Masih dikatakan, merujuk dari Undang-undang Pendidikan Nasional, Kemenag khususnya di Kankemenag Kotabaru mempunyai visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Kotabaru yang taat beragama, cerdas, harmonis dan berkualitas. “Untuk mendukung hal itu, tentulah peran guru Agama Katolik sangat dibutuhkan dengan cara menanamkan nilai-nilai agama kepada para siswa,” katanya.

Salman menambahkan, guru juga harus profesional dalam membentuk peserta didik yang terampil, kreatif dan mandiri, terlebih pada zaman now dimana perkembangan teknologi tidak dapat dibendung lagi kecanggihannya. “Maka peran guru secara profesional dapat menjadikan proses pengajaran yang inovatif,”

tambahnya.

Sementara itu Penyelenggara Bimbingan Masyarakat (Bimas) Katolik KanKemenag Kotabaru, Toniadi, M.Pd selaku ketua panitia dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi guru agama Katolik sehingga mampu meningkatkan kompetensi pengajaran di bidang agama Katolik.

“Kegiatan yang diikuti sebanyak 36 guru Agama Katolik ini juga bertujuan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran serta kompetensi guru dan memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia,” pungkasnya.(Rep: Aan/ Ft: Handoyo)



Ka.Kankemenag HST Apresiasi Lomba Peringati Milad MTsN 9



Barabai (Kanwil Kalsel) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kab. HST) H. Fakhruddin mengapresiasi kegiatan lomba untuk memperingati Milad yang dilaksanakan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 9 HST, Selasa (27/3/18) di hala-

man madrasah.

Menurut H. Fakhruddin, kegiatan lomba untuk peringatan Milad ke-21 MTsN 9 HST tersebut sangat bagus untuk dilaksanakan. Ia mendukung kegiatan tersebut apalagi pada kegiatan itu juga diikuti Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Se-

kolah Dasar (SD) se kecamatan Pandawan. “Dengan ikutnya MI dan SD se kecamatan Pandawan juga dapat menjadi ajang promosi bagi MTsN 9,” tambahnya.

Sementara itu Kepala MTsN 9 Hasby mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan dan kegiatan unggulan yang ada di MTsN 9 HST kepada peserta didik MI/SD. “Semoga nantinya mereka tertarik dan menjadikan MTsN 9 HST menjadi pilihan utama untuk melanjutkan pendidikan,” katanya.

Kegiatan lomba dalam rangka memperingati Milad ke-21 MTsN 9 HST tersebut, baca puisi islami, Azan, Busana muslim, tarik tambang dan futsal. (Rep: Fik/ Ft: Iky)

Selamat & Sukses

**Penyelenggaraan
UNBK dan UAMBN-BK di
Madrasah pada Jenjang
MTs dan MA di Kalsel
Tahun 2017-2018**

**Prosentase
100 %**



Ka.Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi, Menyerahkan Piagam Penghargaan dari Menteri Agama kepada Gubernur Kalimantan Selatan atas Dukungan Penyelenggaraan UNBK dan UAMBN-BK di Madrasah pada Jenjang MTs dan MA Tahun Pelajaran 2017-2018 dengan Prosentase 100%, pada upacara peringatan HARDIKNAS di halaman Kantor Setdaprov Kalsel. Rabu, 2 Mei 2018.